

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di daerah pedesaan. Di desa inilah potensi sumberdaya manusia dan sumber daya alam berada. Maka orientasi pembangunan yang menitikbertakan pada pedesaan adalah suatu tindakan yang sangat strategis, karena secara langsung maupun tidak langsung hal itu akan memberikan dampak yang positif dan sangat luas. Selain itu kaitan antara masyarakat sebagai pelaku pembangunan dan potensi utama yang ada dipedesaan, maka desa memegang peranan yang penting.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendukung dan sangat berarti terhadap pembangunan, karena melalui pariwisata dapat diperoleh dana dan jasa bagi pembangunan, diantaranya dapat dilihat dari bentuk devisa, pajak dan distribusi yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang pariwisata. Dalam perencanaan pengembangan suatu daerah, sektor pariwisata memberikan peranan besar terhadap peningkatan daerah.

Di Indonesia pembangunan hampir menjadi kata kunci bagi segala hal. Salah satunya ialah pembangunan pariwisata. Sebagai negara yang memiliki banyak potensi pariwisata, Indonesia tentu dapat melakukan pembangunan disektor pariwisata. Pembangunan pariwisata pada intinya merupakan suatu aktifitas yang menggali segala potensi pariwisata baik yang berasal dari sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya buatan manusia yang semuanya memerlukan penanganan secara menyeluruh.

Salah satu faktor dalam pariwisata adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata itu sendiri. Partisipasi masyarakat tersebut berlangsung secara sukarela dan adanya keberlanjutan. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi yang memandang masyarakat sebagai subjek dari segala aturan pembangunan bukan sebagai objek pembangunan. Pelibatan masyarakat ini secara utuh dilakukan melalui pola pikir pembangunan yang memandang masyarakat sebagai subjek peraturan dengan keanekaragaman perilaku. Melalui proses pelibatan partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang akan muncul suatu sistem evaluasi dari kegiatan pengembangan pembangunan yang telah dilakukan dan menjadi masukan bagi proses pengembangan selanjutnya.

Pembangunan pariwisata yang berhasil adalah pembangunan pariwisata yang dilakukan secara bersama termasuk “membangun bersama masyarakat” sehingga pembangunan pariwisata dapat memberikan keuntungan secara ekonomi, sosial maupun budaya kepada masyarakat setempat. Tujuan dari pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat diantaranya yaitu, 1) memberdayakan masyarakat melalui pembangunan pariwisata, 2) meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial maupun budaya dari pembangunan pariwisata, 3) memberikan kesempatan yang seimbang kepada seluruh anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah pendekatan partisipatif.

Sementara itu partisipasi diartikan sebagai keterlibatan, tetapi aspek keterlibatan itu sering diartikan secara sempit. Suatu program dikatakan melibatkan masyarakat ketika masyarakat sudah diajak melaksanakan suatu program tertentu.

Padahal sebenarnya suatu program bersifat partisipatif apabila masyarakat sudah terlibat sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil. Sebagai contoh masyarakat yang berada di sekitar Aek Pea Porokan Desa Salaon Toba. Masyarakat mengaku bahwa mereka pernah diajak untuk berdiskusi bahwa di sekitar areal tempat tinggal mereka akan dibangun tempat wisata. Materi diskusi masih sebatas itu, sedangkan setelah berjalannya objek wisata tersebut masyarakat kurang terlibat.

Seharusnya agar timbul rasa memiliki dari masyarakat, maka masyarakat haruslah dilibatkan dalam pengelolaan areal tempat wisata. Pelibatan tersebut seharusnya mulai dari perencanaan, yaitu apapun yang ingin diprogramkan oleh pengelola tempat pariwisata didiskusikan dengan masyarakat. Dengan harapan masyarakat akan merasa memiliki program tersebut, dan turut membantu kelancaran program tersebut. Pada dasarnya masyarakat itu sendiri berhak ikut serta dalam pengelolaan pariwisata. Seperti yang telah tertuang dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, dalam pasal 19 ayat 2 bahwa setiap orang atau masyarakat dalam atau disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja atau buruh, konsinyasi dan pengelolaan. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang kepariwisataan tersebut maka ada landasan yang mengatur tentang hak masyarakat untuk bersama-sama mengelola pariwisata.

Partisipasi masyarakat dirasa sangat penting dalam proses pembangunan pedesaan. Menurut Raharjo Adisasmita dalam buku pembangunan pedesaan, masyarakat diajak berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi karena masyarakat dianggap mengetahui tentang permasalahan dan kepentingan atau kebutuhan mereka. Mereka memahami tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Selain itu ada beberapa alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai

sifat penting. *Pertama* adalah fokus utama dan tujuan akhir dari pembangunan, karena itu partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. Memandang masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan menjadi sangat penting dalam rangka memanusiakan masyarakat. *Kedua* partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat. *Ketiga* partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. *Keempat* partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi khas daerah. Itulah sebabnya mengapa partisipasi masyarakat dianggap penting dalam proses pembangunan, karena masyarakat itu sendiri yang lebih mengetahui, tentang permasalahan dan kebutuhan, baik didalam bidang lingkungan, sosial dan ekonomi. Termasuk dalam proses pembangunan, atau pengembangan pariwisata.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1990 pasal 30 tentang pariwisata, dan telah di perbaharui dengan UU No.9 Tahun 2009, Pemerintah menyerahkan sebagian urusan dibidang penyelenggaraan pariwisata kepada pemerintah daerah. Penyerahan sebagian urusan pariwisata kepada PEMDA tersebut diperluas dengan keberadaan UU No.32 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah. Memungkinkan setiap daerah untuk memilih sector yang menjadi andalannya sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kebutuhan masyarakatnya. Jika pariwisata menjadi salah satu faktor andalan dalam pembangunan suatu wilayah, maka wilayah tersebut harus memiliki berbagai keunikan karakteristik untuk pengembangan perekonomian, sekaligus mampu memberdayakan masyarakat luas, baik pelaku maupun penikmat dari pengembangan pariwisata.

Saat ini perkembangan pariwisata khususnya dikabupaten samosir mulai meningkat. Ini terlihat dari jumlah wisatawan yang mengunjungi kabupaten

samosir. Pada tahun 2017 mencapai 1.334.482 pengunjung. Jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2016 sebanyak 1.279.065 pengunjung, dan pada tahun 2015 sebanyak 688.876 pengunjung. Selain itu banyaknya desa wisata mulai berkembang di kabupaten Samosir juga ikut meramaikan pariwisata yang ada di Kabupaten Samosir.

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu prioritas dari enam prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Samosir di bidang pariwisata. Prioritas pembangunan di bidang pariwisata tersebut antara lain: Meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan, melestarikan asset seni daerah, meningkatkan jumlah desa wisata, desa budaya, pariwisata budaya, penghargaan budaya di kelompok kesenian. Program pengembangan desa wisata oleh PEMDA Samosir merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan masyarakat lokal di desa wisata untuk ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan desa mereka dengan potensi yang dimiliki. Demi keberhasilan pelaksanaan program ini, harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat desa, pemerintah dan swasta. Masyarakat desa kedudukannya menjadi setara dengan pemerintah dan swasta yakni sebagai investor yang mendukung program desa wisata. Masyarakat sebagai pemilik desa namun juga ikut andil dalam program pembangunan desa.

Saat ini jumlah desa wisata di Kabupaten Samosir sebanyak 8 desa wisata. Akan tetapi menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samosir dikutip dari Antarnnews.com “Dari 8 desa wisata yang tumbuh hanya 3 sampai 4 desa wisata yang secara berkala mampu mendatangkan kunjungan, sehingga diharapkan menjadi percontohan menjadi pengembangan desa wisata yang lain”.

Salah satu desa yang melakukan pengembangan desa wisata adalah Desa Salaon Toba yang ada di Kabupaten Samosir. Desa ini terletak di Kecamatan Ronggurnihuta, sekitar 10 Km dari Pangururan. Desa Salaon Toba ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Samosir sebagai desa wisata sejak tahun 2015. Dahulunya Desa Salaon Toba merupakan desa yang terpelosok dan tidak maju karena jumlah keluarga miskin lebih dari 60% (BPS, 2014). Untuk kendaraan masuk saja hanya bisa menggunakan sepeda motor sedangkan untuk kendaraan roda empat belum bisa melewati tempat itu. Namun dengan menggali potensi yang ada di desanya terutama potensi pariwisata, saat ini Desa Salaon Toba menjadi salah satu tempat kunjungan wisata di Kabupaten Samosir. Di Desa Salaon Toba tersebut, terdapat objek wisata danau yang diberi nama "Aek Pea Porohan". Dari potensi alam inilah kemudian dikembangkan oleh desa wisata Salaon Toba sebagai obyek wisata, sehingga obyek wisata ini yang menjadi andalan untuk menarik minat wisatawan datang ke desa wisata tersebut. Selain memiliki objek wisata Desa salaon toba juga menyediakan tempat *homesty* bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pedesaan yang masih asri dan juga pertunjukan seni budaya seperti antraksi alat musik tradisional Batak yaitu Uning-uningan dan Tortor Batak.

Sejak munculnya pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDES) dan Samosir menjadi daerah kunjungan wisata lokal dan internasional pada tahun 2015 Desa Salaon Toba terus berupaya dalam mengeksplorasi potensi yang ada di Desa tersebut. Hingga pada tahun 2015 memulai usaha pengembangan Desa Wisata. Dalam pengembangan desa wisata, masyarakat turut serta dalam pengelolaan Desa Wisata tersebut. Seperti yang ada di desa wisata Salaon Toba saat ini pengelolaan dalam BUMDes desa wisata ini melibatkan masyarakat, sehingga pemerintah desa hanya mengarahkan dan memfasilitasi saja.

Namun yang terlihat walaupun pemerintah berusaha melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan desa wisata tersebut masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya terlibat dalam setiap proses kegiatan yang direncanakan/diprogramkan pemerintah desa. Salah satu contohnya ketika pemerintah desa Salaon Toba membuat rencana untuk membangun taman-taman kecil di setiap persimpangan jalan, dan mengharapkan masyarakatlah yang berperan sepenuhnya disini, tapi yang terlihat masih banyak masyarakat yang belum ikut serta dalam kegiatan tersebut walaupun ikut hanya sebatas datang.

Dalam pengembangan Desa Wisata setidaknya ada tiga aktor yang berperan penting yaitu wisatawan, penduduk setempat dan bisnis pariwisata atau perantara. Ketiga aktor tersebut harus melebur secara utuh untuk mewujudkan industri pariwisata yang dapat menguntungkan semua pihak. Wisatawan merupakan aktor penentu, karena aktifitas desa wisata muncul karena adanya perubahan selera wisatawan dalam memandang daerah tujuan wisata. Sedangkan penduduk setempat adalah mereka yang terkena dampak dari kunjungan wisatawan, yang mempersiapkan apa yang dibutuhkan wisatawan. Untuk bisnis pariwisata adalah mereka yang mempromosikan daerah tujuan wisata kepada wisatawan sehingga merupakan aktor yang mencari keuntungan dari wisatawan dan memberikan keuntungan bagi penduduk setempat.

(Probaningrum 2010:5)

Ada beberapa reaksi yang muncul terhadap pengembangan desa wisata. Ketika pengembangan desa wisata di galakkan di desa salaon toba, berbagai reaksi muncul dari masyarakat, ada yang setuju ada pula yang tidak setuju dengan di kembangkannya desa tersebut menjadi desa wisata. Permasalahan lain yang berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Salaon Toba dengan belum optimalnya kelembagaan masyarakat terkait dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat

untuk aktif dalam pengembangan desa wisata. Belum meratanya penguatan sadar wisata terkait dengan upaya meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata menyebabkan rendahnya pemahaman akan manfaat pengembangan desa wisata. Pemahaman desa wisata berbasis masyarakat akan mempengaruhi sikap mereka menerima atau menolak konsep desa wisata.

Sebagai komponen utama dalam pengembangan Desa Wisata berbasis masyarakat, warga lokal mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pariwisata. Tapi ironis ketika masyarakat lokal hanya berperan sebagai objek atau penonton yang tidak ikut terlibat atas pengelolaan pariwisata ditanahnya sendiri, atau terlibat ketika pelaksanaan kegiatan saja sementara pada saat perencanaan, masyarakat belum sepenuhnya terlibat. Padahal pemerintah pun mengharapkan masyarakatlah yang membuat ide-ide yang cocok untuk proses pengembangan wisata.

Disamping sebagai pengelola BUMDes masyarakat juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan objek wisata diantaranya sebagai pemandu wisata, penyedia jasa penyebrangan menggunakan perahu, dan juga mendirikan warung-warung yang menyediakan berbagai makanan khas Batak Toba. Namun yang terjadi bukannya masyarakat lokal yang berperan disitu malah para pelaku usaha yang datang dari luar desa tersebut yang lebih banyak berperan dalam hal tersebut.

Adanya berbagai aktifitas masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan Desa Wisata Salaon Toba dan penulis melihat partisipasi masyarakat masih kurang aktif dalam keterlibatan dalam berpartisipasi dilihat dari kurang terlibatnya masyarakat dalam proses pengembangan desa wisata di Desa Salaon Toba. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Faktor-faktor yang**

mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Salaon Toba Kabupaten Samosir”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah antara lain

1. Partisipasi masyarakat dalam pengeelolaan desa wisata masih kurang baik, terlihat dari kurangnya keikutsertaan masyarakat masyarakat dalam pengelolaan desa wisata di Desa Salaon Toba.
2. Belum banyak masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan objek wisata di Desa Salaon Toba
3. Rendahnya kesadaran dan komitmen masyarakat dalam mendukung kegiatan pariwisata di Desa Salaon Toba

1.3. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu hanya membahas tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Salaon Toba Kabupaten Samosir”

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Talaon Toba Kabupaten Samosir”?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Salaon Toba Kabupaten Samosir.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi warga masyarakat (tempat penelitian) guna meningkatkan pemahaman tentang pariwisata dalam mewujudkan desa wisata dan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Desa Wisata di Desa Salaon Toba Kabupaten Samosir.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Salaon Toba Kabupaten Samosir.